



NASIONAL

Misteri Pasal “Gibran Banget” di PKPU 19/2023, Ahmad Doli: Ayat 3 Tak Ada Saat Dibahas DPR

Oleh Redaksi · 10 Okt, 20:32 WIB



BANDA ACEH — Asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kembali menjadi sorotan. Pasal yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden dan wakil presiden tertentu itu dipersoalkan karena

diduga muncul tanpa melalui pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tengah menelusuri kembali proses pembentukan aturan tersebut. Doli, yang menjabat Ketua Komisi II DPR saat PKPU itu dirumuskan pada 2023, menyatakan tidak mengingat adanya Pasal 18 ayat

(3) ketika aturan tersebut dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Polemik ini mencuat dalam gugatan keabsahan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, bahkan menyebut ketentuan tersebut sebagai pasal

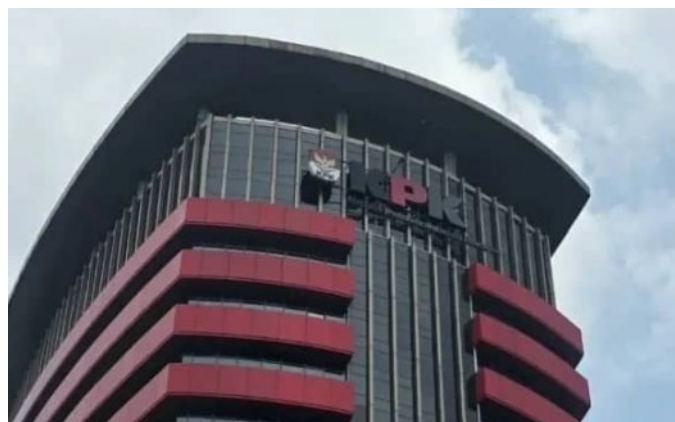
“Gibran banget” karena dinilai mengakomodasi pencalonan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu pada Pilpres 2024.

“Saya juga sedang mencari tahu ya, apakah Pasal 18 ayat (3) yang katanya beredar berita itu diselundupkan, ya, kan? Pasal-pasal selundupan.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

NASIONAL

KPK Bongkar Dugaan Uang Mukhtar NU dari OTT ATR/BPN



BANDA ACEH— Dugaan aliran uang untuk kepentingan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ikut menjadi sorotan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri asal-usul, tujuan, hingga kemungkinan aliran dana tersebut kepada pihak-pihak lain.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

NASIONAL

Berubah Sikap, Jokowi Dinilai Fokus Selamatkan Karir Politik Gibran



BANDA ACEH -Perubahan sikap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - yang tidak lagi lantang menyuarakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode, melain-

kan menyebut Pemilu masih jauh - diduga berkaitan dengan upaya menyelamatkan masa depan Politik sang putra sulung.

[Selengkapnya di halaman 3 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
EKONOMI	12
HIBURAN	14
Aneka Berita	16

NASIONAL

KPU Bantah Pasal “Gibran Banget” Diselundupkan, Klaim Sudah Ada Sejak September 2023



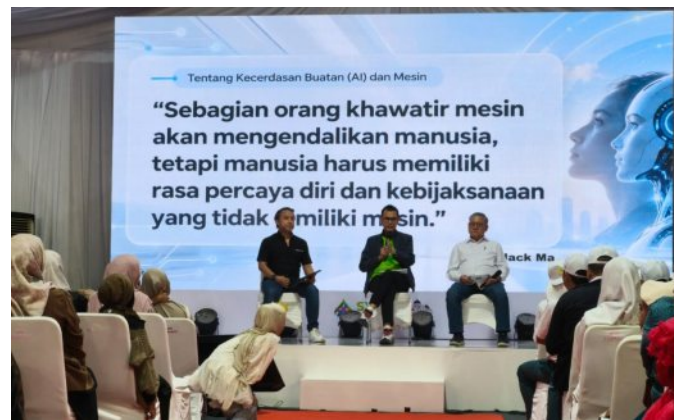
BANDA ACEH — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tuduhan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang

pencalonan presiden dan wakil presiden.

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

EKONOMI

Bank Aceh Syariah dan Jaringan PRIMA Dorong Literasi Keuangan Syariah dan Transaksi Digital melalui SYAFIF x PRIMA Talkshow



BANDA ACEH – Bank Aceh Syariah dan Jaringan PRIMA memberikan edukasi tentang keuangan syariah dan transaksi digital melalui SYAFIF x PRIMA Talkshow with Bank Aceh Syariah.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Syariah Financial Fair (SYAFIF) ini diselenggarakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 10 Oktober 2026.

[Selengkapnya di halaman 12 »](#)

HIBURAN

Dugaan Penipuan Emas Rp25 Miliar Seret Nama Kirana Larasati hingga Jennifer Coppen



BANDA ACEH - - Kasus dugaan penipuan jual beli emas yang menyeret PT Divine Gold Jewelry dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Perkara ini mencuat setelah sejumlah korban mengaku mengalami kerugian dengan total mencapai Rp25 miliar.

[Selengkapnya di halaman 14 »](#)

OPINI

Selebar Ijazah dan Roh Pendidikan yang Hilang

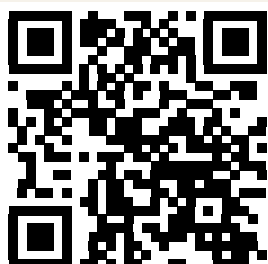


Oleh: Yudhi Hertanto

SERU! Kita tidak sedang berbicara mengenai ijazah sebagai syarat pencalonan jabatan publik, melainkan tentang esensi lembar pengukuhan akademik tersebut di tengah gempuran kecerdasan buatan. Era modern menghadirkan solusi instan melalui teknologi, yang kemudian mengambil alih berbagai bidang pekerjaan.

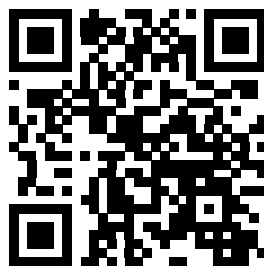
[Selengkapnya di halaman 16 »](#)

BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

20 BERITA

NASIONAL

Misteri Pasal “Gibran Banget” di PKPU 19/2023, Ahmad Doli: Ayat 3 Tak Ada Saat Dibahas DPR

Oleh Redaksi · 10 Okt, 20.32 WIB



BANDA ACEH — Asal-usul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kembali menjadi sorotan. Pasal yang mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden dan wakil presiden tertentu itu dipersoalkan karena diduga muncul tanpa melalui pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tengah menelusuri kembali proses pembentukan aturan tersebut. Doli, yang menjabat Ketua Komisi II DPR saat PKPU itu dirumuskan pada 2023, menyatakan tidak mengingat adanya Pasal 18 ayat (3) ketika aturan tersebut dibahas bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Polemik ini mencuat dalam gugatan keabsahan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mah-

kamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, bahkan menyebut ketentuan tersebut sebagai pasal “Gibran banget” karena dinilai mengakomodasi pencalonan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu pada Pilpres 2024.

“Saya juga sedang mencari tahu ya, apakah Pasal 18 ayat (3) yang katanya beredar berita itu diselundupkan, ya, kan? Pasal-pasal selundupan. Nah, saya juga sedang mencari data, mengumpulkan data, karena waktu itu kan saya Ketua Komisi II,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, beberapa waktu lalu.

Dua Kali Dibahas, Doli Mengaku Tak Menemukan Ayat 3

Doli menjelaskan, pembahasan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berlangsung dalam dua tahap. Pembahasan pertama dilakukan pada September 2023, sebelum MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai

batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Pembahasan berlanjut pada Oktober 2023, setelah putusan MK tersebut, dengan agenda yang secara khusus membicarakan perubahan ketentuan batas usia pencalonan.

Namun, menurut Doli, Pasal 18 ayat (3) yang kini dipersoalkan tidak ditemukan dalam pembahasan yang diingatnya.

“Sementara kan di PKPU yang dibahas September, ayat 3 itu kan enggak ada. Pasal 18 ayat (3) yang sekarang dipersoalkan kemarin itu kan tidak ada,” ujarnya.

Doli kembali menegaskan, sepanjang pengetahuannya, ketentuan tersebut tidak muncul dalam pembahasan bersama DPR dan KPU.

“Jadi, sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada,” katanya.

Doli menyatakan akan memanggil KPU apabila ditemukan dugaan penyisipan ketentuan tersebut tanpa melalui prosedur yang

semestinya. Penelusuran itu dinilai penting untuk memastikan bagaimana pasal tersebut masuk ke dalam aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Bawaslu Sebut Ayat 3 Baru Muncul Saat Harmonisasi

Keterangan Doli bukan satu-satunya yang menyoroti proses kemunculan pasal tersebut. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja sebelumnya juga menyampaikan keterangan mengenai keberadaan Pasal 18 ayat (3) dalam persidangan MK pada 1 Oktober 2026.

Bagja menyatakan ketentuan tersebut tidak ditemukan saat uji publik maupun pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR. Menurut dia, pasal itu baru muncul pada tahap harmonisasi peraturan.

“Pada saat PKPU uji publik tidak ada Pasal 18 ayat (3). Kemudian pada saat RDP dalam pembahasan di DPR tidak ada ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

KPU Bantah Pasal “Gibran Banget” Diselundupkan, Klaim Sudah Ada Sejak September 2023

Oleh Redaksi · 10 Okt, 20.36 WIB



BANDA ACEH — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tuduhan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. KPU menegaskan, ketentuan yang kini dipersoalkan dalam perkara persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu telah tercantum dalam rancangan peraturan sejak September 2023.

Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan, dokumen rancangan PKPU yang menjadi materi pembahasan bersama DPR dan pemerintah telah diserahkan kepada para pembentuk undang-undang. Menurutnya, keberadaan pasal tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen resmi pembahasan.

“Semua dokumen utuh Rancangan PKPU tersebut yang menjadi materi dalam Rapat Konsinyering dan Rapat Dengar Pendapat antarkPU dengan Pembentuk UU pada waktu itu telah diserahkan kepada Pembentuk UU,” kata Idham di Jakarta.

Idham menjelaskan, Pasal 18 ayat (3) sudah tercantum dalam dokumen rancangan saat rapat konsinyering pada 19 September 2023, sehari sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI. KPU juga menyatakan dokumen fisik rancangan telah dibagikan kepada pimpinan dan peserta rapat.

KPU menilai, keberadaan dokumen tersebut menjadi dasar untuk membantah tuduhan bahwa ketentuan itu baru disisipkan setelah pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

Idham memastikan KPU akan memaparkan dokumen pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurutnya, proses penyusunan peraturan tersebut dapat diperiksa melalui dokumen yang dibuat pada saat pembahasan berlangsung. KPU menegaskan penyusunan PKPU telah dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Pernyataan KPU ini muncul setelah asal-usul Pasal 18 ayat (3) kembali menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.

Pasal tersebut mengatur pengecualian kewajiban menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan itu dipersoalkan karena dinilai berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2023.

Ahmad Doli Mengaku Tak Menemukan Pasal Saat Pembahasan

Bantahan KPU berseberangan dengan keterangan Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi II DPR RI yang menjabat ketua komisi tersebut ketika PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dibahas.

Doli sebelumnya mengaku tengah mengumpulkan dokumen dan menelusuri dugaan penyisipan Pasal 18 ayat (3). Ia menyatakan tidak mengingat keberadaan ketentuan tersebut dalam pembahasan bersama KPU pada September dan Oktober 2023.

“Jadi sebetulnya, setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada,” ujar Doli.

Doli menjelaskan, pembahasan PKPU berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada September 2023, sebelum MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Pembahasan berikutnya berlangsung pada Oktober 2023, setelah putusan tersebut terbit.

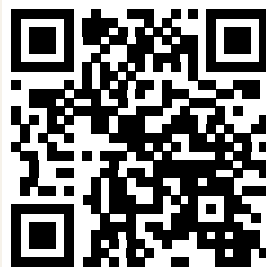
Karena itu, Doli ingin memastikan kapan ketentuan yang kini dipersoalkan tersebut masuk ke dalam rancangan hingga menjadi bagian dari peraturan resmi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

KPK Bongkar Dugaan Uang Muktamar NU dari OTT ATR/BPN

Oleh Redaksi · 10 Okt, 17.27 WIB



BANDA ACEH— Dugaan aliran uang untuk kepentingan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ikut menjadi sorotan dalam penyidikan kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri asal-usul, tujuan, hingga kemungkinan aliran dana tersebut kepada pihak-pihak lain.

Penyidikan ini menjadi perhatian setelah KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan barang bukti elektronik (BBE) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan seluruh uang yang diamankan dalam operasi tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri siapa yang memberikan uang, tetapi juga

modus pemberian dan tujuan penggunaannya.

"Terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan," kata Budi kepada wartawan di Jakarta dikutip Sabtu (10/10/2026).

KPK juga mendalami kemungkinan uang tersebut tidak berhenti pada para tersangka, melainkan mengalir kepada pihak lain.

"Apakah berhenti kepada pihak-pihak sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain," ujarnya.

Pernyataan Budi disampaikan ketika ditanya mengenai dugaan adanya uang yang disiapkan untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk informasi mengenai kemungkinan pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka menuju lokasi muktamar.

Orang Kepercayaan Nusron Belum Memberikan Jawaban Tegas

Nama Arif Sugiyanto, yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, turut menjadi perhatian dalam pendalaman dugaan tersebut.

Seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu tengah malam, 7 Oktober 2026, Arif belum memberikan penjelasan tegas ketika ditanya mengenai dugaan uang yang disiapkan untuk Muktamar NU.

Arif sempat tertawa kecil sebelum menjawab, "Nanti Insya Allah terjawab, Pak."

Ketika ditanya apakah uang tersebut disiapkan atas perintah Nusron Wahid, Arif kembali memberikan jawaban singkat.

"Masih proses ini, Pak," katanya.

Ia kemudian menegaskan bahwa perkara yang menjeratnya masih dalam proses penyidikan.

"Masih penyidikan terus," pungkask Arif.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada penjelasan tegas dari Arif mengenai

dugaan uang untuk kepentingan muktamar maupun apakah dana tersebut berkaitan dengan perintah Nusron Wahid.

KPK Mendalami Pendalaman dugaan aliran dana yang dikaitkan dengan kegiatan muktamar sebenarnya telah disampaikan KPK sejak September 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana untuk kegiatan muktamar salah satu organisasi di Indonesia menjadi salah satu materi yang akan didalami penyidik.

"Tadi ditanyakan. Apakah benar ada penyampaian informasi atau keterangan terkait dengan kegiatan muktamar salah satu organisasi di Indonesia. Kita belum bisa sampaikan. Tetapi artinya ini juga menjadi substansi atau materi penyidikan yang akan nanti didalami oleh tim penyidik," kata Taufik kepada wartawan, Rabu, 16 September 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Berubah Sikap, Jokowi Dinilai Fokus Selamatkan Karir Politik Gibran

Oleh Redaksi · 10 Okt, 17.13 WIB



BANDA ACEH -Perubahan sikap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - yang tidak lagi lantang menyuarakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode, melainkan menyebut Pemilu masih jauh - diduga berkaitan dengan upaya menyelamatkan masa depan Politik sang putra sulung.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi perubahan sikap tersebut.

Kemungkinan pertama berkaitan dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Gibran yang dinilai berpotensi memengaruhi reputasi dan kredibilitas Wakil Presiden tersebut.

"Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang," ujar Jamiluddin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2026.

Jamiluddin menduga Jokowi kini lebih realistis. Menurutnya, mempertahankan jabatan wakil presiden tanpa menghadapi proses pemakzulan kini menjadi prioritas utama, ketimbang membicarakan peluang dua periode pada Pilpres 2029.

"Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk. Bagi Jokowi, jangan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus," tambahnya.

Jika pemakzulan terjadi, dampaknya akan sangat merusak kelanjutan karier politik Gibran. Karena itu, Jokowi diprediksi akan memanfaatkan sisa pengaruh politiknya untuk melobi para ketua umum partai, termasuk Presiden Prabowo Subianto, agar Gibran tetap bertahan di pemerintahan.

"Untuk itu, Jokowi tampaknya akan menggunakan sisa-sisa pengaruhnya untuk melobi para ketua umum partai untuk tidak memakzulkan Gibran. Termasuk tentunya Presiden Prabowo Subianto," kata Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, langkah tersebut dapat dibaca sebagai strategi mundur selangkah demi mempertahankan peluang politik yang lebih besar bagi Gibran. Jokowi, kata dia, tidak harus memaksakan wacana dua periode sejak dini selama posisi politik putranya masih bisa dipertahankan.

"Jadi, Jokowi disini menganut falsafah mundur selangkah untuk maju beberapa langkah," ujarnya.

Kemungkinan kedua, Jamiluddin menilai Jokowi belum tentu sepenuhnya yakin terhadap peluang Prabowo pada Pilpres 2029. Perubahan narasi menjadi Pemilu masih jauh, menurutnya, dapat memberi ruang bagi Jokowi untuk menentukan strategi politik yang lebih fleksibel.

Dengan tidak mengunci dukungan pada skema Prabowo-Gibran dua periode, Ritonga menduga Jokowi ingin memastikan masa depan politik Gibran tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Prabowo maupun koalisi partai pendukungnya.

Ia menilai, jika mendekati Pilpres 2029 peluang Prabowo dinilai melemah, Jokowi berpotensi mempertimbangkan Gibran sebagai calon presiden dengan mencari pasangan yang memiliki elektabilitas tinggi. Sebaliknya, apabila Prabowo masih memiliki peluang politik yang kuat, Jokowi diperkirakan akan berupaya mempertahankan skema Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Jadi, perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres," katanya.

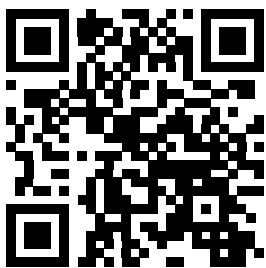
Ritonga menyimpulkan, arah politik Jokowi terhadap Prabowo-Gibran pada 2029 kemungkinan akan ditentukan oleh kalkulasi politik menjelang pemilihan. Dalam pandangannya, Jokowi akan mempertimbangkan posisi Prabowo sekaligus peluang Gibran untuk melanjutkan karier politiknya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

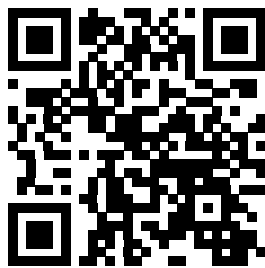
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Golkar Sudah Mantap Dukung Prabowo, Tapi Mengapa Nama Gibran Tak Disebut?

Oleh Redaksi · 10 Okt, 17.38 WIB



BANDA ACEH - Golkar memastikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2029, tetapi tak menyebut Gibran sebagai cawapres. Benarkah sinyal Politik mulai berubah?

Partai Golkar sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pilpres 2029.

Namun, ada satu hal yang menarik perhatian, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum disebut sebagai calon pendamping Prabowo.

Apakah ini pertanda koalisi mulai melirik sosok lain untuk posisi orang nomor dua di pemerintahan?

Dukungan Golkar kepada Prabowo menjadi sorotan karena belum disertai kepastian mengenai figur calon wakil presiden (cawapres).

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi tentang arah politik partai beringin dalam menghadapi pemilihan presiden mendatang.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai dukungan Golkar kepada

Prabowo tidak otomatis berarti partai tersebut ingin kembali mengusung Gibran sebagai pendampingnya.

Menurut Adi, Golkar tampaknya sudah memiliki pandangan tersendiri mengenai figur yang dianggap paling tepat untuk mendampingi Prabowo pada periode kedua.

"Bagi Golkar di 2029, Prabowo yes, Gibran no," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa dukungan kepada calon presiden dan penentuan cawapres bisa menjadi dua keputusan politik yang berbeda.

Adi menilai dukungan terhadap Prabowo merupakan langkah realistis bagi Golkar.

Sebagai petahana, Prabowo dinilai memiliki modal politik yang dapat menjadi keuntungan dalam menghadapi persaingan Pilpres 2029.

Pengalaman memimpin pemerintahan dan dukungan dari partai-partai koalisi menjadi faktor yang membuat posisi Prabowo diperhi-

tungan dalam kontestasi mendatang.

Di sisi lain, Adi menyoroti elektabilitas Gibran yang menurut penilaiannya belum cukup menonjol.

Ia juga menyinggung posisi Gibran yang tidak memiliki partai politik sendiri sebagai salah satu tantangan dalam membangun dukungan politik.

"Sementara pada saat bersamaan Gibran selain elektabilitasnya tak mentereng plus tak punya partai. Bagi Golkar sepertinya tak rasional usung Gibran lagi," ujarnya.

Meski begitu, pernyataan Adi merupakan analisis politik, bukan keputusan resmi Golkar untuk menolak Gibran.

Belum diumumkan nama cawapres juga tidak serta-merta membuktikan bahwa peluang Wakil Presiden tersebut sudah tertutup.

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, turut menyoroti arah dukungan partai-partai dalam pemerintahan Prabowo.

Menurut Agung, koalisi saat ini lebih berorientasi memastikan

keberlanjutan pemerintahan hingga periode kedua.

Adapun sosok yang akan mendampingi Prabowo masih belum diketahui secara pasti.

Ia menilai dukungan Golkar terhadap Prabowo perlu dipahami sebagai sikap partai dalam menjaga posisinya di koalisi pemerintahan.

Golkar sendiri memiliki perwakilan di kabinet, di antaranya Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi.

Keterlibatan kader Golkar dalam pemerintahan memperlihatkan peran partai tersebut dalam mendukung agenda Prabowo.

Karena itu, dukungan untuk pencalonan kembali Prabowo dinilai sejalan dengan posisi politik Golkar saat ini.

Agung juga berpandangan bahwa kemungkinan Gibran tidak kembali menjadi cawapres patut diperhitungkan.

NASIONAL

Pernah Sebut Gibran Anak Haram Konstitusi, Wakil Ketua Harian PKB: Saya Tak Tarik Ucapan Itu

Oleh Redaksi · 10 Okt, 17.22 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Harian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Gielbran Muhammad Noor menegaskan dirinya tidak menarik ucapannya yang pernah menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai 'anak haram konstitusi'. Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menjabat Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2023 lalu.

"Sampai sejauh ini saya tidak menarik ucapan itu. Jadi, saya tidak menarik ucapan soal yang pernah saya sampaikan soal Mas Gibran," kata Gielbran saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

Pernyataan itu tetap dia pertahankan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempersoalkan ijazah Wapres Gibran. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tak menemukan ijazah Gibran setara SMA atau sederajat.

Gielbran menyampaikan dirinya saat ini tidak ingin fokus memba-

has isu ijazah. Menurutnya masih banyak isu yang lebih substantif yang penting dibahas.

"Tapi pada prinsipnya yang soal ijazah ini saya rasa kita perlu apa namanya, move on, jadi, karena belakangan ini kan terlalu sering kita membahas soal ijazah kan, baik ijazahnya si A, si B, dan segala macam," katanya.

Menurutnya bila Gibran tak berkenan terhadap putusan MK, maka dia harus membuktikan kinerjanya sebagai Wakil Presiden.

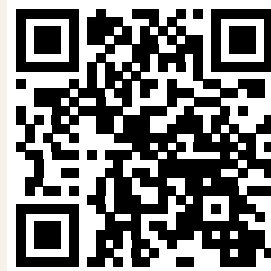
"Toh juga saya rasa Mas Gibran juga harus bisa membuktikan kalau semisal putusan itu bagi beliau kurang berkenan, ya tunjukkan dengan kinerja, gitu," katanya.

Dalam kesempatan ini, dia juga menyatakan PKB tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu mengenai wacana pansus pemakzulan Gibran, hingga kini belum ada sikap resmi dari PKB

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

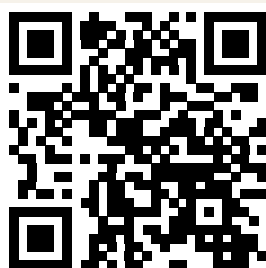
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Golkar: Putusan MK soal Gibran jadi Pukulan Telak

Oleh Redaksi · 10 Okt, 13.15 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 harus menjadi momentum introspeksi bagi penyelenggara negara.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berpandangan bahwa, putusan tersebut tidak cukup hanya dijadikan pembelajaran, tetapi juga harus menjadi teguran agar penyelenggaraan Pemilu ke depan berjalan lebih baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Tentu bagi para penyelenggara Pemilu, putusan MK ini bukan saja sekedar sebagai pelajaran, tapi juga sebagai pukulan, sekaligus menjadi bahan introspeksi diri," kata Doli kepada wartawan, dikutip Sabtu, 10 Oktober 2026.

Meski memberikan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu, Doli menegaskan pihaknya tetap menghormati putusan MK. Ia juga mengapresiasi Mahkamah yang

dinilainya mampu menempatkan diri sebagai lembaga hukum dengan membedakan kewenangan yudisial dan ranah Politik.

"Kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih, di mana MK benar-benar menempatkan posisinya sebagai sebuah institusi hukum, yang secara objektif mampu memisahkan mana yang menjadi kewenangannya di ranah hukum dan mana ranah politik yang bukan menjadi kewenangannya," ujarnya.

Doli mengatakan, perkara tersebut menjadi pengingat bahwa setiap proses politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus berlandaskan konstitusi, kepatuhan terhadap aturan, integritas, dan tanggung jawab.

"Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam proses politik apalagi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan negara, seluruhnya harus didasari oleh adanya kepatuhan kepada konstitusi, ketaatan pada aturan, integritas dan tanggung jawab yang ditu-

jukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Lebih lanjut, Doli menyebut putusan MK dapat menjadi bahan penting dalam pembahasan dan penyempurnaan Undang-Undang Pemilu mendatang. Ia mendorong agar ketentuan mengenai persyaratan, rekrutmen, dan seleksi calon pemimpin maupun wakil rakyat diperjelas.

"Dalam kaitan penyusunan UU Pemilu yang akan datang, putusan MK ini menjadi bahan yang akan kita jadikan materi penting dalam perubahan dan penyempurnaan sistem Pemilu kita ke depan," jelasnya.

Ia berharap pembenahan regulasi tersebut dapat menghasilkan mekanisme pencalonan dan seleksi yang lebih terperinci serta transparan, baik untuk pemimpin maupun wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah.

"Hikmahnya adalah bahwa ke depan syarat, proses rekrutmen, dan seleksi para pemimpin dan wakil-wakil rakyat, baik pusat

maupun daerah harus diatur lebih rinci dan diatur mekanisme yang lebih transparan lagi," katanya.

Terkait tindak lanjut politik setelah putusan tersebut, Doli menyebut keputusan berikutnya bergantung pada kesepakatan dan konsensus pimpinan partai politik di DPR. Namun, ia menegaskan setiap langkah harus mengutamakan kepentingan rakyat dan negara.

"Proses selanjutnya tentu adalah proses politik. Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR. Yang terpenting, apapun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara," tutupnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Demokrat Belum Bahas Capres 2029: Belum Dengar Ada Nama Selain Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Okt, 17.18 WIB



BANDA ACEH - Partai Demokrat menyatakan belum membahas kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Demokrat saat ini memilih fokus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan memastikan program-program pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, memastikan pembahasan mengenai capres dan cawapres 2029 belum dilakukan di internal partainya.

"Pertama, belum pernah ada pembicaraan mengenai capres dan cawapres di 2029 di kami. Karena ketum kami, Mas AHY, fokusnya adalah bagaimana kita menjalankan tugas dan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo di pemerintahan sebaik mungkin," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Dia mengatakan, Demokrat memprioritaskan pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, pembicaraan mengenai kandidat capres 2029 memiliki waktunya sendiri.

"Tentu kalau bicara mengenai capres pada tahun 2029, ada waktunya nanti. Saat ini, kami belum pernah membahasnya, dan belum mendengar ada nama selain Bapak Presiden Prabowo untuk kontestasi 2029," ujarnya.

Sementara itu, terkait sosok cawapres, Herzaky menilai pembahasannya merupakan bagian dari perbincangan antara capres dan partai-partai yang akan mengusungnya.

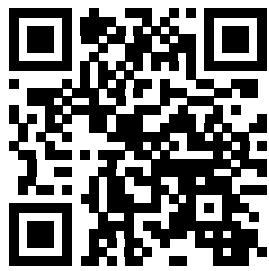
"Kalau berbicara mengenai wakil, ya, itu perbincangan bersama antara capres dan para partai yang akan mengusungnya. Belum saatnya membahas ini sekarang," katanya.

Herzaky menegaskan, Demokrat menghormati partai Politik lain yang telah mulai mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2029. Namun, Demokrat masih berfokus membantu menunaikan janji-janji Prabowo saat kampanye serta mengoptimalkan kinerja kader yang mendapat amanah di pemerintahan

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

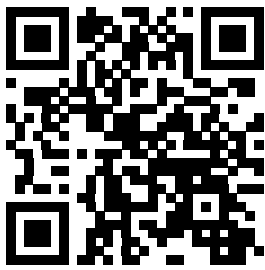
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung Tantang Pengkritiknya soal Wantimpres: Tunggu 10 Tahun, Kalian Bakal Minta Maaf!

Oleh Redaksi · 10 Okt, 09.00 WIB



BANDA ACEH — Rocky Gerung melontarkan pernyataan menohok kepada para aktivis yang mengkritik keputusannya bergabung dengan lingkungan Istana sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ia meminta para pengkritiknya menunggu hingga 10 tahun ke depan sebelum menilai langkah Politik dan intelektual yang diambilnya.

Rocky bahkan memprediksi orang-orang yang kini menyayangkan keputusannya suatu saat akan mengubah pandangan dan meminta maaf kepadanya.

“Tunggu aja 10 tahun lagi mereka minta maaf ke gue,” kata Rocky dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, sebagaimana diberitakan Afu.id, Jumat (9/10/2026).

Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman podcast pada Rabu (7/10/2026).

Ucapan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap keputusan Rocky menerima posisi di lingkungan kekuasaan.

Sosok yang selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintah itu kini menghadapi pertanyaan besar: mampukah ia mempertahankan

independensi ketika berada lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan?

Bagi sebagian pengkritiknya, bergabung dengan lingkaran Istana berpotensi menguji konsistensi sikap kritis Rocky.

Namun, ia menolak anggapan bahwa jabatan akan membuatnya kehilangan kebebasan berpikir.

Rocky menegaskan, menerima posisi di Wantimpres tidak berarti dirinya harus mengubah pandangan atau menanggalkan identitas intelektual yang selama ini melekat padanya.

Rocky Tegaskan Tetap Berani Kritik Prabowo, Jokowi, dan Gibran

Rocky menyatakan tetap akan mengkritik Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun kini berada di lingkungan Istana.

Baginya, kedekatan dengan penguasa tidak semestinya menjadi alasan untuk membatasi kritik.

Ia memandang kekuasaan tetap harus diawasi, terlebih jika tidak memiliki kontrol yang memadai.

Dalam menjelaskan pandangannya, Rocky bahkan menyebut Istana sebagai “sarang korupsi”.

Pernyataan itu menggambarkan kritiknya terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan ketika pengawasan melemah.

Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Rocky ingin mempertahankan ruang kritisnya di tengah jabatan baru.

Ia tidak ingin keputusannya bergabung dengan Wantimpres langsung dimaknai sebagai tanda bahwa dirinya telah meninggalkan posisi sebagai pengkritik kekuasaan.

Namun, pernyataan dan komitmen itu akan menghadapi ujian ketika kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah benar-benar membutuhkan kritik terbuka darinya.

Publik pun memiliki alasan untuk menunggu: apakah Rocky akan tetap bersuara lantang ketika kritiknya berhadapan dengan kepentingan pemerintahan tempat ia kini berada?

Tak Gentar Dikritik Sesama Aktivis

Rocky juga menyadari keputusannya bergabung dengan lingkungan Istana berpotensi mengece-

wakan sebagian aktivis yang selama ini memiliki pandangan atau perjuangan serupa dengannya.

Kritik tersebut tidak lepas dari pertanyaan mengenai konsistensi.

Ketika seseorang yang dikenal keras mengkritik penguasa menerima jabatan di lingkungan pemerintahan, publik tentu ingin mengetahui apakah kedekatan itu akan memengaruhi kebebasannya dalam menyampaikan pendapat.

Rocky, di sisi lain, menilai dirinya tidak seharusnya hanya dihakimi berdasarkan keputusan menerima jabatan.

Ia ingin publik melihat bagaimana dirinya menjalankan peran tersebut dan apakah ia tetap konsisten mempertahankan daya kritisnya.

Pernyataannya tentang kemungkinan permintaan maaf 10 tahun mendatang menjadi jawaban sekaligus tantangan kepada para pengkritiknya.

Rocky seolah meminta mereka memberi waktu sebelum menjatuhkan penilaian akhir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Presiden Prabowo Dituntut Bersikap di Polemik Ijazah Wapres Gibran

Oleh Redaksi · 10 Okt, 17.31 WIB



BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto diminta bersikap tegas dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyebut, jika Presiden Prabowo hanya bisa berdiam tanpa mengambil sikap, malah bisa membuat stigma negatif.

“Seharusnya Prabowo sadar bahwa sasaran terkait ijazah Gibran bukan hanya sekedar menyasar wakil presiden tetapi juga posisi presiden karena keduanya satu paket ketika diajukan pada saat Pilpres 2024 yang lalu,” kata Fernando Emas kepada Holopis.com, Sabtu (10/10).

Dengan sikap tersebut, Fernando kemudian menyinggung pernyataan Budi Arie Setiadi soal percepatan pemilu.

“Sehingga kalau mencermati pernyataan Budi Arie Setiadi tentang percepatan pemilu, mungkin karena sudah melihat ada kelompok yang berupaya ingin menja-

tuhkan Prabowo dan Gibran sebelum berakhir masa jabatannya,” ujarnya.

Fernando menambahkan, kalau Prabowo tetap diam, maka kinerja pemerintahannya akan terus terganggu dan polemik terkait dengan ijazah Gibran akan menjadi pokok bahasan.

“Akibatnya kinerja pemerintahan Prabowo tidak akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyampaikan putusan terhadap perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa malam (06/10).

Dalam putusannya, Mahkamah tidak dapat menerima permohonan para pemohon, yang salah satunya mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wapres Gibran saat mendaftar sebagai Calon Wakil Presiden

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

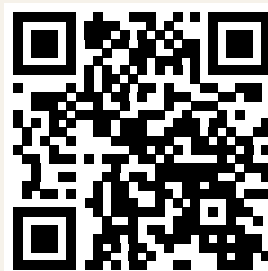
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung Disentil Aktivis Gegara Masuk Istana: Tunggu 10 Tahun Lagi, Mereka Akan Minta Maaf!

Oleh Redaksi · 10 Okt, 13.28 WIB



BANDA ACEH – Rocky Gerung menuai kritik aktivis usai masuk Istana sebagai Wantimpres. Langkahnya memicu sorotan soal konsistensi sikap kritisnya terhadap kekuasaan.

Rocky Gerung kembali menjadi sorotan setelah keputusannya bergabung dengan lingkungan Istana memicu kritik dari sejumlah aktivis.

Sosok yang selama ini dikenal vokal mengkritik pemerintah itu kini mengemban jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Namun, Rocky punya jawaban menohok untuk mereka yang meragukan langkahnya.

Alih-alih mundur menghadapi kritik, Rocky justru meminta para pengkritiknya menunggu hingga sepuluh tahun mendatang.

Ia bahkan memprediksi mereka akan mengubah pandangan dan meminta maaf atas penilaian terhadap dirinya saat ini.

“Tunggu aja 10 tahun lagi mereka minta maaf ke gue,” ujar

Rocky dalam podcast Akbar Faizal Uncensored.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai keputusan Rocky menerima posisi di lingkungan pemerintahan.

Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai figur yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan maupun perilaku para pemegang kekuasaan.

Karena itu, kehadirannya di lingkungan Istana memunculkan pertanyaan tentang konsistensi sikapnya.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Rocky masih bisa mempertahankan kebebasan berpikir dan menyampaikan kritik setelah berada lebih dekat dengan pusat pemerintahan.

Namun, Rocky menegaskan bahwa menerima jabatan tidak berarti dirinya harus mengubah prinsip.

Ia merasa tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan, termasuk ketika penda-

patnya berseberangan dengan pihak yang sedang berkuasa.

Bagi Rocky, kedekatan dengan kekuasaan bukan alasan untuk berhenti bersuara.

Ia menolak anggapan bahwa posisi di lingkungan Istana otomatis membuat seseorang kehilangan independensi dalam berpikir.

Ia juga menegaskan tetap akan mengkritik Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut pandangannya, kekuasaan harus tetap mendapatkan pengawasan.

Tanpa kontrol yang memadai, kekuasaan berisiko disalahgunakan dan membuka ruang bagi praktik korupsi.

Dalam penjelasannya, Rocky bahkan menyebut Istana sebagai “sarang korupsi” ketika menguraikan pandangannya tentang bahaya kekuasaan yang tidak terkontrol.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Rocky ingin mempertahankan posisi kritisnya meski kini

berada di lingkungan pemerintahan.

Ia seolah menegaskan bahwa jabatan yang diterimanya tidak serta-merta menghapus kebebasan untuk mengoreksi penguasa.

Meski begitu, konsistensi sikap tersebut tentu akan menjadi perhatian publik.

Pernyataan tegas saja belum cukup untuk menjawab seluruh keraguan karena masyarakat juga dapat menilai bagaimana Rocky menyampaikan kritik dan menjalankan perannya ke depan.

Rocky menyadari keputusannya masuk ke lingkungan Istana berpotensi mengecewakan orang-orang yang selama ini sejalan dengannya.

Kritik dari sesama aktivis pun menjadi konsekuensi yang harus dihadapi setelah dirinya menerima jabatan tersebut.

Namun, ia tidak menganggap kekecewaan itu sebagai alasan untuk mengubah pendirian.

NASIONAL

Bobby Nasution Tantang Polemik Ijazah Gibran: Sekalian Persoalkan Sarjananya

Oleh Redaksi · 10 Okt, 13.20 WIB



BANDA ACEH — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Bobby menyarankan pihak yang mempersoalkan pendidikan Gibran agar turut mempertanyakan ijazah sarjananya.

Bobby membandingkan polemik pendidikan Gibran dengan persoalan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya juga menjadi perdebatan publik.

“Kalau Pak Jokowi kan yang dipermasalahkan sarjananya. Nanti Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Saran saya, sekalian saja dipermasalahkan sarjananya,” ujar Bobby.

Adik ipar Gibran itu mengaku mengetahui bahwa Wakil Presiden tersebut telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Menurut Bobby, ijazah SMA Gibran menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri.

“Ya, Mas Gibran setuju saya sarjana, ya,” katanya.

Selain menanggapi polemik ijazah, Bobby juga merespons wacana pemakzulan Gibran. Ia meminta agar perhatian publik tidak hanya tersita oleh perdebatan mengenai posisi wakil presiden, sementara kebutuhan dasar masya-

rakat masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu,” ujar Bobby.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berlanjutnya perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, MK menyatakan gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

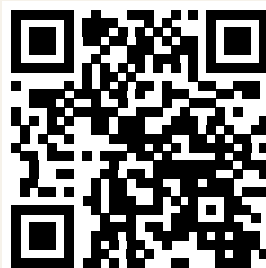
Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Hakim konstitusi Adies Kadir juga menyampaikan bahwa secara faktual Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

MK turut menyatakan persoalan mengenai bukti ijazah yang setara dengan SMA tersebut merupakan ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan UUD 1945

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Belasan Orang Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Guru Pondok Pesantren di Bekasi

Oleh Redaksi · 10 Okt, 13.33 WIB



BANDA ACEH - Belasan orang diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di salah satu pondok pesantren wilayah Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Kasus tersebut kini ditangani Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polres Metro Bekasi Kota.

Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota Kopol Rosdiana Sirait mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga salah satu korban pada Rabu (7/10/2026).

"Kami telah mengidentifikasi lebih dari 10 orang yang diduga menjadi korban," kata Rosdiana dalam keterangan resminya, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan keterangan awal, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi berulang kali sejak 2023 hingga September 2026.

Saat ini polisi telah menetapkan seorang guru berinisial MHH (28) sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut.

Ia juga dikenal sebagai ketua pondok pesantren.

Rosdiana mengatakan, MHH telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik pada Jumat (9/10/2026).

"Berdasarkan hasil penyidikan, MHH telah ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Rosdiana.

Menurut Rosdiana, tersangka telah mengenal salah satu korban sejak 2023, saat korban masih menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut.

Kasus ini berkembang setelah polisi memperoleh informasi mengenai korban lain yang diduga mengalami perbuatan serupa.

Rosdiana mengatakan, penyidik masih mendalami dugaan perbuatan tersangka, termasuk hubungannya dengan para korban dan kedudukannya di lingkungan pesantren.

"Saat ini kami sedang menda-

lami dugaan perbuatannya," kata Rosdiana.

Dalam pemeriksaannya, MHH memberikan keterangan mengenai hubungan pribadinya dengan salah satu korban dan peristiwa yang menjadi objek laporan.

Penyidik kemudian mencocokkan keterangan tersebut dengan keterangan korban, para saksi, serta alat bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi.

Dalami Dugaan Keterlibatan Tiga Orang Lain

Selain MHH, polisi masih mendalami dugaan keterlibatan tiga orang lainnya dalam perkara tersebut.

Salah satunya merupakan petugas keamanan pesantren.

"Kami terus mengembangkan perkara ini untuk memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum," ujar Rosdiana.

Ia menegaskan, setiap perkembangan penanganan perkara akan

disampaikan berdasarkan hasil penyidikan.

Polisi juga tetap mengutamakan perlindungan dan kerahasiaan identitas para korban.

Selain mengusut dugaan tindak pidana, polisi menyiapkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk melakukan asesmen dan memberikan pendampingan kepada korban.

Rosdiana mengatakan, perlindungan dan pemulihan psikologis menjadi bagian penting dalam penanganan perkara, terutama karena terdapat korban yang masih berusia anak.

"Kami ingin memastikan para korban mendapat perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhannya," kata Rosdiana.

Polisi masih mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi dan korban, serta mendalami rangkaian kejadian untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.

NASIONAL

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.20 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu menunjukkan ijazah SMA secara terbuka untuk menjawab polemik yang menjadi perhatian publik saat ini.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah berpandangan, keterbukaan Gibran menjadi cara sederhana untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus mencegah polemik berkepanjangan. Dengan begitu, Gibran juga tidak perlu menunggu gugatan baru untuk memperlihatkan dokumen pendidikan.

"Kalau memang punya ijazah, tidak usah menunggu gugatan lagi. Mas Gibran menyatakan siap kalau ada gugatan lagi untuk menunjukkan ijazahnya. Tidak perlu membuat gaduh lagi atau menimbulkan pertanyaan baru," ujar Said sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLJatim, Jumat, 9 Oktober 2026.

Said memastikan PDIP tidak punya kepentingan di balik polemik ijazah Gibran. Ia juga meminta partainya tidak dikaitkan dengan dugaan adanya pihak yang bermain di belakang layar.

"Tidak anak, tidak bapak (Jokowi), dua-duanya problemnya

ijazah terus. Saya tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Jangan sampai PDIP dianggap berada di belakang layar atau menjadi pemain utama dalam persoalan ini. Kami tidak berkepentingan terhadap semua itu," tegasnya.

Menurut Said, persoalan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga menyangkut etika pejabat publik. Karena itu, ia meminta Gibran mengambil langkah konkret untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat.

"Kehormatan yang paling tinggi bagi pemerintahan adalah etika. Menjaga etika itu nomor satu," katanya.

Said juga menanggapi pernyataan Gibran yang menyebut dirinya tidak mungkin menempuh pendidikan S1 jika tidak lulus SMA. Menurut Said, pernyataan tersebut bisa dijawab dengan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan.

"Saya membaca berbagai komentar Mas Gibran di media, bahwa tidak mungkin bisa S1 kalau tidak lulus SMA. Ya, monggo tunjukkan saja ijazah SMA-nya. Kan sederhana," ucapnya.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

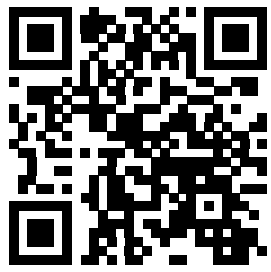
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

PKS Minta Pimpinan DPR Respons Aspirasi Warga soal Polemik Gibran

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.28 WIB



BANDA ACEH -Politisi senior PKS, Mulyanto, minta Pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mulyanto menyebut Pimpinan DPR perlu mengkaji putusan MK tentang kedudukan Gibran yang saat mengikuti Pilpres 2024.

Ia menyebut DPR punya tanggung jawab konstitusi untuk menyikapi putusan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Polemik terkait Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Setidaknya ada tiga isu yang pernah menimbulkan kegaduhan nasional, yakni polemik syarat usia calon wakil presiden, isu akun Fufufafa, serta persoalan syarat pendidikan atau ijazah," kata Mulyanto dalam pesan elektronik kepada RMOL di

Jakarta, Jumat malam, 9 Oktober 2026.

"Dalam beberapa hari ke depan saya kira arah aspirasi masyarakat akan semakin terlihat. Publik tentu menginginkan kejelasan, bukan persoalan yang terus menggantung," tambahnya.

Mulyanto berharap DPR dapat merespons aspirasi tersebut secara bijaksana sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Lembaga perwakilan tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan publik yang berkembang luas dan sekarang semakin jelas dengan munculnya fakta hukum dalam putusan MK.

Ia menegaskan PKS sendiri sudah menyampaikan sikap politiknya untuk mendorong DPR menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas, transparan, dan sesuai koridor konstitusi.



"Bagi kita, ini bukan soal suka atau tidak suka secara personal kepada seseorang. Ini soal bagaimana institusi demokrasi bekerja, bagaimana hukum dijalankan, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga. Ini kan soal etika demokrasi, etika berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Ia menambahkan, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang menyembunyikan persoalan, melainkan demokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme konstitusional yang bermartabat.

"Demokrasi harus semakin baik dari hari ke hari. Kritik, pengawasan, klarifikasi, dan pertanggungjawaban justru merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi," tegas dia.

Terkait kemungkinan adanya aspek pidana dalam berbagai perkara yang dipersoalkan publik,

Mulyanto meminta aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional dan proaktif, apabila memang terdapat fakta serta bukti yang memenuhi unsur hukum.

"Jangan mendahului kesimpulan, tetapi jangan pula pasif. Bila ada dugaan tindak pidana, biarkan hukum bekerja secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi," tegasnya lagi.

Lanjut Mulyanto, penyelesaian yang terang justru akan baik bagi semua pihak, termasuk bagi Wapres Gibran sendiri.

"Negara tidak boleh memelihara teka-teki terlalu lama. Dalam kehidupan publik, kejelasan adalah bagian dari keadilan. Dan keadilan adalah fondasi kepercayaan kepada demokrasi," tandasnya

NASIONAL

Fadli Rumakefing: Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.24 WIB



BANDA ACEH -Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa (Speda), Fadli Rumakefing, mencurigai Rocky Gerung sengaja ditempatkan dalam lingkaran kekuasaan untuk menyerang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dalam pemerintahan.

Kecurigaan itu disampaikan Fadli merespons pernyataan Rocky yang meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden sebagaimana disampaikan dalam podcast Akbar Faizal, Kamis, 8 Oktober 2026.

"Saya curiga, jangan-jangan Rocky dipasang untuk menyerang Mas Gibran dari dalam sistem kekuasaan eksekutif. Boleh dong saya curiga," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Fadli menilai, pernyataan Rocky perlu dilihat dari posisinya sebagai pejabat publik. Menurut dia, setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik melekat dengan jabatan yang diemban.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan

Gibran merupakan satu pasangan kepemimpinan nasional yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.

"Prabowo-Gibran adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Anda (Rocky) dilantik menjadi Anggota Wantimpres, apa pun yang Anda ucapkan di ruang publik itu melekat dengan jabatan Anda," ujarnya.

Fadli menilai, kritik Rocky terhadap Gibran tidak sejalan dengan pandangan Rocky yang selama ini kerap berbicara mengenai moral dan etika.

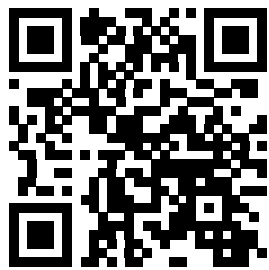
"Rocky ini kan dikenal sebagai orang yang sering bicara berbusa-busa soal moral, soal etika. Tapi mengapa dia terlihat sangat tidak beretika sebagai pejabat publik, seketika menyerang Mas Gibran di podcast Akbar Faizal," tuturnya.

Meski demikian, dugaan bahwa Rocky sengaja ditempatkan untuk menyerang Gibran dari dalam kekuasaan merupakan kecurigaan Fadli yang belum disertai bukti dalam pernyataannya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Buntut Pesta Narkoba Napi, Petugas Rutan Depok Dipecat

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.43 WIB



BANDA ACEH - Seorang petugas Rutan Kelas I Depok berinisial SD dipecat buntut kasus pesta sabu oleh narapidana. Petugas berstatus aparat sipil negara (ASN) itu diduga menyelundupkan narkoba ke dalam rutan hingga tiga kali.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) Komjen Rudi Setiawan mengatakan, pemecatan dilakukan sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut.

"Yang Depok itu kita pecat ya. Satu orang kita berhentikan. Inisialnya SD," ujar Rudi seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Rudi menyebut SD merupakan petugas yang diduga memasukkan sabu ke dalam rutan sebanyak tiga kali. Sementara itu, petugas lain yang terlibat dijatuhi hukuman disiplin. Namun, ia tidak merinci identitas maupun bentuk sanksi yang diberikan kepada mereka.

"Petugasnya, petugas yang memasukkan tiga kali narkoba ke dalam lapas, itu kita berhentikan. Statusnya ASN, ya," kata dia.

Kasus pesta sabu di Rutan Depok sebelumnya ditangani Polres Metro Depok. Polisi mulai menyelidiki kasus itu pada 27 September 2026, sebelum menjadi viral pada 3 Oktober 2026.

Dalam penyelidikan, polisi menggeledah lokasi yang diduga digunakan untuk pesta sabu dan

memeriksa dua petugas rutan. Keduanya diduga memiliki peran berbeda dalam memasukkan barang ke dalam rutan.

Kapolres Metro Depok Kombes Christian Rony Putra mengatakan, satu petugas diduga menyediakan sabu, sedangkan petugas lainnya diduga membawa lampu disko dan alat musik.

"Yang jelas sampai sekarang peranan mereka berdua itu hanya satu menyediakan alat musik, satu menyediakan sabu," ungkap Rony di Balai Kota Depok, Senin (5/10/2026).

Polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri asal sabu yang masuk ke rutan. Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada kepala rutan seba-

gai bahan pertimbangan pemberian sanksi terhadap kedua petugas.

Rony mengatakan, sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman administratif maupun kode etik agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami akan sampaikan ke Kepala Rutan supaya yang dua orang ini bisa diberikan sanksi, apakah itu administratif atau sanksi kode etik dan sebagainya. Supaya nanti ke depan ada efek jera, supaya tidak terulang lagi," tuturnya.

Polisi juga telah memeriksa urine kedua petugas tersebut. Hasilnya, keduanya dinyatakan negatif narkoba.

NASIONAL

Sebut Tak Substantif, Refly Harun Enggan Buang Energi Debat dengan “Termul” Soal Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 10 Okt, 10.15 WIB



BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara Refly Harun mendadak menjadi sorotan publik setelah menyatakan keenggannya untuk berdebat dengan sosok yang di julukinya sebagai "Termul" pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Refly menanggapi dinamika panas yang terjadi di ruang publik dan media sosial menyusul putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut. Menurutnya, perdebatan dengan pihak-pihak tertentu yang dinilai tidak substantif atau hanya sekadar melontarkan retorika tanpa argumen hukum yang mendasar sudah tidak lagi produktif.

Pasca-putusan MK yang menolak gugatan terkait kualifikasi dan syarat administrasi pendaftaran,

perdebatan di ruang publik kian terpolarisasi. Sejumlah pengamat hukum, akademisi, hingga tokoh Politik saling beradu argumen mengenai implikasi hukum dari pertimbangan majelis hakim terhadap jalannya pemerintahan.

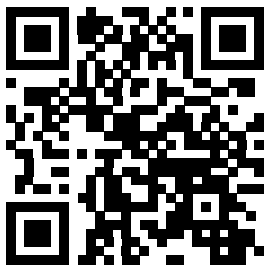
Refly Harun, yang kerap vokal mengkritisi jalannya proses hukum dan politik nasional, menilai bahwa diskursus hukum seharusnya dikembalikan pada substansi konstitusi dan fakta persidangan yang objektif, bukan sekadar ajang perdebatan verbal yang berpotensi memperkeruh suasana politik nasional.

Sikap enggan berdebat ini mencerminkan kejenuhan sebagian kalangan intelektual terhadap diskursus politik yang kerap terjebak pada polemik personal alih-alih substansi penegakan hukum dan etika bernegara

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

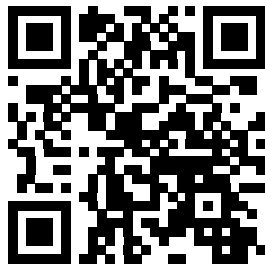
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Sikat Koruptor Pulihkan Kepercayaan Publik

Oleh Redaksi · 10 Okt, 10.40 WIB



BANDA ACEH -Kerja senyap ditunjukkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi. Tak banyak bicara, jarang tampil di media, tapi hasil kerjanya progresif dan meyakinkan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan mengatakan, kendati belum genap tiga bulan menjabat Jampidsus, Kuntadi terbukti berani menyeret pelaku kejahatan besar serta berhasil menyelamatkan triliunan kerugian negara.

"Kinerja Jampidsus Kuntadi sangat progresif, berani menasar sektor sumber daya alam, mengusut perkara yang melibatkan korporasi besar yang selama ini tidak

tersentuh, termasuk perkara TPPU," kata Iwan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang ditangani Jampidsus baru-baru ini. Salah satunya, kasus dugaan manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dengan perkiraan kerugian negara hingga Rp2 triliun.

Kejagung telah menetapkan PT TPL berikut beberapa orang sebagai tersangka. Kasus lain adalah dugaan korupsi perkara nikel PT Ceria Nugraha Indotama di mana Kejagung berhasil memulihkan kerugian negara Rp4401,6 miliar.

Ada juga kasus dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas

Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP dengan kerugian negara mencapai Rp2 triliun.

"Banyak lagi kasus lain yang menyeret korporasi serta pejabat kementerian atau pejabat daerah dengan nilai kerugian fantastis. Termasuk korupsi kawasan hutan di mana ribuan hektare berhasil dikuasai kembali oleh negara," jelasnya.

Menurut Iwan, gaya Kuntadi cenderung senyap dalam mengusut dan menangani perkara yang merugikan keuangan negara. Alih-alih mengejar sensasi dan viralitas, pendekatan kerja yang dijalankan justru mengedepankan prinsip

ketelitian, proses yang sistematis dengan hasil yang terukur.

"Tidak hanya bermodal keberanian, dia punya pendekatan komprehensif tentang bagaimana menangani tindak pidana korupsi serta memaksimalkan penyelamatan keuangan negara," beber dia.

Di sisi lain, Iwan menepis tuduhan Kuntadi bagian dari rezim Joko Widodo (Jokowi) atau Geng Solo.

"Justru kita harus curiga isu itu sengaja dihebuskan untuk melemahkan kinerja Jampidsus yang selama ini memang dikenal kaku, tidak mau kompromi dengan koruptor," pungkasnya.

NASIONAL

Denny Indrayana Desak Prabowo Buka Suara soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.54 WIB



BANDA ACEH - Penggugat syarat pendidikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana menagih Presiden Prabowo Subianto untuk menyikapi secara terbuka terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukan ijazah SMA sederajat Gibran Rakabuming Raka.

Denny menilai, sikap Presiden diperlukan karena partai-partai Politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan disebut masih menunggu arah politik Prabowo sebelum menentukan posisi mereka terhadap persoalan tersebut.

"Kita belum melihat satu koma, satu titik dari Presiden Prabowo atas putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat strategis terkait tentang nasib bangsa Indonesia. Ini adalah presidensial issue, presidensial responsibility," kata Denny Indrayana di Jakarta, Jumat (9/10).

Pakar hukum tata negara itu menekankan, sebagai pemimpin pemerintahan, Prabowo perlu menyampaikan pandangannya mengenai persoalan tersebut. Menurut Denny, kejelasan sikap Presiden dibutuhkan agar arah penyelesaian polemik tidak terus berada dalam ketidakpastian.

"Sebagai nakhoda bangsa ini, pada tempatnya, pada waktunya, Presiden (harus) memberikan positioning dia," tegasnya.

Denny juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh sejumlah partai politik setelah MK membacakan putusannya. Namun, ia menyebut partai-partai tersebut masih memilih sikap wait and see atau menunggu perkembangan sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

Menurut Denny, sikap yang ditunggu oleh partai-partai itu berkaitan erat dengan posisi Prabowo, baik sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai Gerindra. Ia menilai pandangan Prabowo akan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan sikap politik koalisi.

"Yang ditunggu adalah bagaimana posisi Ketua Umum Parta Gerindra, yang ditunggu adalah bagaimana posisi Presiden terhadap Wapresnya," ucap Denny.

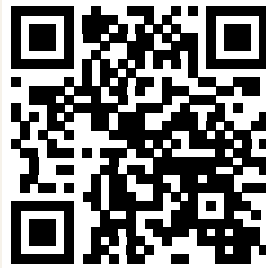
Lebih lanjut, Denny memperkirakan partai politik pendukung pemerintah akan tetap berhati-hati selama Prabowo belum menyampaikan sikapnya. Ia menduga, posisi para ketua umum partai yang juga menjabat sebagai menteri di kabinet turut memengaruhi keberanian mereka untuk mengambil sikap berbeda.

"Ketika Presiden Prabowo hanya diam hakul yakin mereka akan diam saja. Gak mau mereka kehilangan posisi menterinya, para ketua umum partai itu," pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

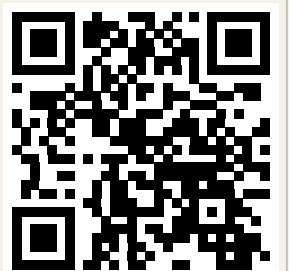
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



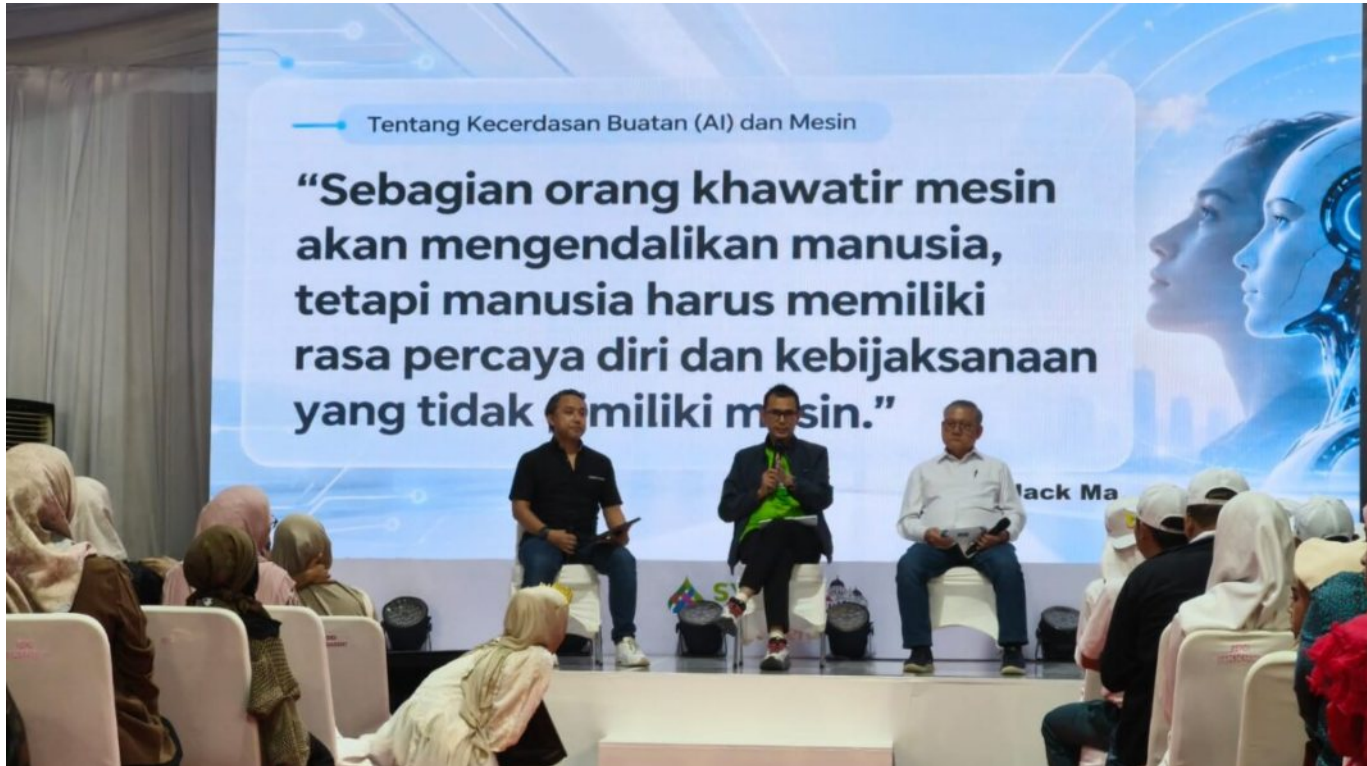
EKONOMI

3 BERITA

EKONOMI

Bank Aceh Syariah dan Jaringan PRIMA Dorong Literasi Keuangan Syariah dan Transaksi Digital melalui SYAFIF x PRIMA Talkshow

Oleh Redaksi · 10 Okt, 16.40 WIB



Bank Aceh Syariah dan Jaringan PRIMA memberikan edukasi tentang keuangan syariah dan transaksi digital melalui SYAFIF x PRIMA Talkshow with Bank Aceh Syariah. Kegiatan yang merupakan bagian dari Syariah Financial Fair (SYAFIF) ini diselenggarakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu, 10 Oktober 2026. FOTO/HAL.

BANDA ACEH – Bank Aceh Syariah dan Jaringan PRIMA memberikan edukasi tentang keuangan syariah dan transaksi digital melalui SYAFIF x PRIMA Talkshow with Bank Aceh Syariah.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Syariah Financial Fair (SYAFIF) ini diselenggarakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 10 Oktober 2026.

Melalui talkshow ini, masyarakat diajak memahami prinsip perbankan syariah, mengenal berbagai layanan keuangan, serta mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital.

Edukasi ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Aceh sekaligus memperkenalkan layanan transaksi yang dapat mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Bank Aceh Syariah juga membahas pentingnya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Aceh sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah, termasuk dalam proses pemulihan pascabencana banjir.

Dalam kondisi tersebut, kehadiran layanan keuangan yang tetap dapat diakses, menjadi salah satu bentuk dukungan nyata bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kelancaran transaksi, serta membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

Untuk memperluas inklusi keuangan, Bank Aceh Syariah terus mengembangkan jaringan layanan dan inovasi produk bagi masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan (unbanked) maupun yang aksesnya masih terbatas (underbanked).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui produk simpanan berbasis syariah, pembiayaan untuk kebutuhan usaha, serta berbagai layanan digital seperti Action Mobile, Action Bisnis, ActionLink atau layanan agen, dan Action Merchant.

Pengembangan layanan tersebut turut didukung oleh PT Rintis Sejahtera, pengelola Jaringan PRIMA yang merupakan lembaga switching dalam ekosistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Jaringan PRIMA berperan menghubungkan penyedia jasa pembayaran (PJP) agar berbagai layanan transaksi dapat saling terhubung.

Melalui kolaborasi dengan Jaringan PRIMA, layanan Bank Aceh Syariah dapat terkoneksi dengan ekosistem pembayaran yang lebih luas. Saat ini, dukungan Jaringan PRIMA terhadap Bank Aceh Syariah mencakup ATM, Debit, Internet Banking, pengisian saldo (Top Up), pembayaran tiket pesawat Lion Air serta BI-FAST Multitenancy.

Melalui layanan BI-FAST Multitenancy, Bank Aceh Syariah dapat memanfaatkan skema sharing infrastruktur yang dibangun dan dikelola oleh PT Rintis Sejahtera, sehingga pengelolaan biaya menjadi lebih efisien serta tetap mendukung kelancaran, keamanan, dan keandalan transaksi nasabah.

Ke depan, kolaborasi akan terus diperluas melalui pengembangan sejumlah fitur transaksi, mulai dari QRIS mencakup MPM, CPM, hingga TUNTAS.

Pengembangan layanan juga tidak hanya difokuskan pada transaksi domestik, tetapi turut diperluas untuk mendukung transaksi lintas negara, seperti QRIS di Malaysia menggunakan Action Mobile serta layanan tarik tunai dan transaksi pembelian menggunakan kartu Debit berlogo UnionPay melalui jaringan ATM dan EDC internasional yang mendukung transaksi UnionPay.

Muhammad Hendra Supardi, Direktur Dana dan Jasa PT Bank Aceh Syariah mengatakan, kegiatan edukasi seperti SYAFIF x PRIMA Talkshow with Bank Aceh Syariah menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah sekaligus memperkenalkan perkembangan layanan perbankan yang dapat mendukung kemudahan transaksi.

"Kami berharap masyarakat semakin memahami layanan keuangan syariah sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan transaksi yang semakin lengkap dan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

EKONOMI

Rahayu Saraswati Mundur dari Komisaris Utama TRIN, Saham Anjlok 14,28 Persen

Oleh Redaksi · 10 Okt, 10.35 WIB



BANDA ACEH -Perubahan jajaran pengurus membayangi PT Perintis Trinitati Properti Tbk (TRIN) setelah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama. Pada saat yang sama, saham emiten properti yang dikenal dengan nama Trinland tersebut ditutup melemah tajam pada perdagangan Jumat 9 Oktober 2026.

Manajemen TRIN menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Rahayu pada 7 Oktober 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat 9 Oktober 2026.

"Pada tanggal 07 Oktober 2026, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Ibu Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo selaku Komisaris Utama Perseroan," tulis manajemen, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2026.

Pengunduran diri tersebut selanjutnya akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Sebelum keputusan tersebut berlaku efektif, Rahayu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama. Ia juga akan mendukung kelancaran proses transisi sesuai mekanisme dan ketentuan korporasi.

Meski meninggalkan jabatan komisaris, Rahayu masih tercatat sebagai pemegang saham TRIN, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perseroan menegaskan pengunduran diri tersebut tidak serta-merta mengakhiri hubungannya dengan perusahaan.

Manajemen juga menyatakan akan melanjutkan visi yang dibawa Rahayu selama bergabung dengan perseroan. Visi tersebut antara lain mendorong pembangunan gedung dan pengembangan properti yang lebih ramah lingkungan, memperkuat perspektif perempuan di sektor properti, serta meningkatkan kualitas dan keunggulan desain.

Dari sisi operasional, TRIN menyebut pengunduran diri tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan saat ini.

Perseroan akan menyampaikan hasil RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masyarakat paling lambat dua hari kerja setelah rapat diselenggarakan.

Di pasar saham, TRIN justru menghadapi tekanan jual yang cukup besar. Pantauan RMOL, sahamnya ditutup pada harga Rp204 per lembar, turun Rp34 atau 14,28 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp238.

Sepanjang perdagangan, saham TRIN dibuka di Rp240 dan sempat menyentuh level tertinggi Rp248. Adapun harga terendah yang tercatat dalam data perdagangan berada di Rp214, sebelum saham berakhir di Rp204.

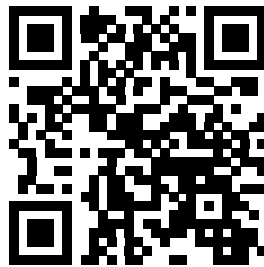
Aktivitas transaksi tercatat mencapai 48,60 juta saham dengan nilai sekitar Rp10,97 miliar melalui 4.635 kali transaksi.

Meski tekanan pada saham TRIN terjadi bersamaan dengan pengumuman pengunduran diri tersebut, data yang tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa perubahan jabatan menjadi penyebab langsung pelemahan harga saham.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

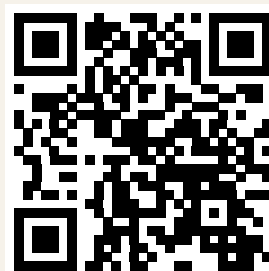
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



EKONOMI

Jejak Permainan Pajak Adaro Milik Boy Thohir, KPK Sudah Geledah 8 Lokasi

Oleh Redaksi · 10 Okt, 10.27 WIB



BANDA ACEH – Nama pengusaha Garibaldi Thohir alias Boy Thohir kembali menjadi sorotan seiring penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Perusahaan tambang yang terkait dengan Adaro, kelompok usaha yang dipimpin Boy Thohir, ikut menjadi perhatian dalam pengusutan perkara tersebut.

KPK mengeledah delapan lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru pada 26–28 Agustus 2026. Pengeledahan menyasar rumah dan kantor pihak swasta. Penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara untuk mendalami konstruksi kasus dan menguji keterlibatan pihak-pihak yang mengetahui transaksi terkait.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dokumen yang ditemukan akan dianalisis dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui substansi per-

kara. KPK juga menegaskan bahwa setiap fakta dan alat bukti harus memiliki keterkaitan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perkembangan ini menjadi penting karena penyidikan tersebut bersinggungan dengan perusahaan sektor pertambangan. Pada 2 September 2026 bahwa KPK mengonfirmasi salah satu dari delapan lokasi pengeledahan merupakan perusahaan pertambangan.

Namun, keterangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pribadi Boy Thohir dalam tindak pidana yang sedang disidik.

Sebelum pengeledahan, KPK telah memeriksa mantan Kepala Divisi Pajak PT Adaro Energy Tbk, Jul Seventar Tarigan, pada 19 Agustus 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak. Informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci bentuk pemberian, nilai transaksi, ataupun pihak yang diduga mene-

rima dan memberikan uang tersebut.

KPK juga belum menjelaskan apakah seluruh lokasi yang digeledah memiliki hubungan langsung dengan Jul Seventar Tarigan. Karena itu, pemeriksaan mantan petinggi pajak perusahaan dan pengeledahan sejumlah lokasi harus dipahami sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti, bukan sebagai bukti final kesalahan seseorang.

Meski demikian, pemeriksaan tersebut menempatkan aktivitas perpajakan perusahaan sebagai salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri. Penyidik perlu mengungkap apakah terdapat transaksi yang menyimpang, siapa saja yang terlibat, dan apakah ada keuntungan yang diperoleh melalui dugaan praktik korupsi.

Dugaan Pengalihan Laba US\$125 Juta

Sorotan terhadap Adaro bukan perkara baru. Pada Juli 2019, organisasi investigasi internasional Global Witness menerbitkan laporan mengenai dugaan pengalihan

keuntungan Adaro melalui jaringan perusahaan luar negeri.

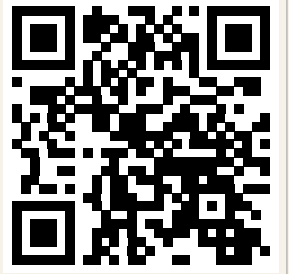
Laporan itu menyoroti aktivitas Coaltrade Services International, anak usaha Adaro yang berbasis di Singapura, dalam perdagangan batu bara yang berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia.

Global Witness memperkirakan pengaturan bisnis tersebut berpotensi membuat Adaro membayar pajak hingga US\$125 juta lebih rendah daripada yang mungkin dibayarkan jika keuntungan terkait dikenai pajak di Indonesia selama periode 2009–2017.

Angka tersebut merupakan estimasi Global Witness, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan KPK dalam penyidikan perkara pajak Banjarmasin saat ini.

Laporan tersebut juga mengungkap peningkatan rata-rata komisi penjualan Coaltrade dari sekitar US\$4 juta per tahun sebelum 2009 menjadi sekitar US\$55 juta per tahun selama periode 2009–2017.

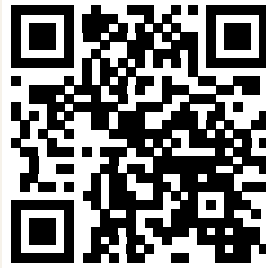
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

HIBURAN

3 BERITA

HIBURAN

Dugaan Penipuan Emas Rp25 Miliar Seret Nama Kirana Larasati hingga Jennifer Coppen

Oleh Redaksi · 10 Okt, 10.20 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penipuan jual beli emas yang menyeret PT Divine Gold Jewelry dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Perkaranya ini mencuat setelah sejumlah korban mengaku mengalami kerugian dengan total mencapai Rp25 miliar.

Dalam kasus tersebut, sejumlah artis dan influencer turut menjadi sorotan setelah nama mereka disebut oleh kuasa hukum pelapor terkait materi promosi perusahaan. Namun, penyebutan nama tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam dugaan tindak pidana.

Berikut kronologi dugaan penipuan emas yang dilaporkan merugikan korban hingga Rp25 miliar.

1. Perusahaan Menawarkan Jual Beli Emas dengan Bonus Menggurkan

Kasus ini bermula dari penawaran transaksi jual beli emas menggunakan sistem pre-order (PO). Menurut kuasa hukum pelapor, Bionda Johan Anggara, perusahaan menawarkan bonus yang

dinilai menggiurkan kepada calon pembeli.

Salah satu penawaran yang disebutkan adalah pembelian emas 5 gram dengan bonus tambahan emas 4 gram. Penawaran tersebut membuat sejumlah orang tertarik mengikuti transaksi yang ditawarkan.

Namun, menurut keterangan kuasa hukum, emas yang dijanjikan tidak kunjung diterima korban meski pembayaran telah dilakukan.

2. Korban Juga Ditawari Layanan Buyback Emas

Selain menawarkan emas melalui sistem PO, perusahaan diduga menjalankan transaksi pembelian kembali atau buyback emas merek Antam, UBS, dan BSI.

Dalam skema tersebut, konsumen disebut dijanjikan pembelian emas dengan harga tinggi. Akan tetapi, berdasarkan keterangan kuasa hukum pelapor, sejumlah korban mengaku tidak mendapatkan kembali uang maupun emas sesuai kesepakatan.

Dugaan masalah dalam transaksi tersebut kemudian menjadi salah

satu dasar pelaporan terhadap perusahaan.

3. Kantor Cabang di Tiga Kota Dilaporkan Tutup

Kecurigaan para korban semakin menguat setelah kantor operasional perusahaan di Bali, Jakarta, dan Surabaya dilaporkan tutup.

Pada saat bersamaan, para korban disebut mengalami kesulitan menghubungi orang-orang yang sebelumnya menawarkan transaksi, termasuk pihak direksi perusahaan.

Kondisi tersebut mendorong para korban menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti dugaan kerugian yang mereka alami.

4. Kerugian Korban Mencapai Rp25 Miliar

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan penipuan dan pencucian uang.

Bionda menyebut total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp25 miliar. Meski demikian, jumlah kerugian dan dugaan tindak pidana dalam perkara ini

masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

5. Sejumlah Artis dan Influencer Disebut dalam Materi Promosi

Kasus ini turut menjadi perhatian publik setelah kuasa hukum pelapor menyebut sejumlah figur publik yang diduga muncul dalam materi promosi perusahaan.

Nama yang disebut antara lain Jennifer Coppen, Kirana Larasati, dan Nope Novian. Selain itu, terdapat tokoh publik asal Bali berinisial AWK yang menurut Bionda juga ditemukan dalam materi promosi.

Bionda menilai keberadaan figur publik menjadi salah satu faktor yang membuat kliennya tertarik mengikuti penawaran perusahaan.

Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut belum membuktikan bahwa mereka mengetahui atau terlibat dalam dugaan penipuan. Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui peran masing-masing pihak dalam kegiatan promosi tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

HIBURAN

Indra Kenz Dijebloskan Lagi ke Penjara, Masuk Sel Isolasi

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.40 WIB



BANDA ACEH - Indra Kenz kembali mendekam di Lapas Kelas I Tangerang setelah pembebasan bersyarat (PB) yang diperolehnya dicabut. Terpidana kasus investasi bodong Binomo itu kini ditempatkan di sel isolasi khusus di blok maximum security.

Kepala Lapas Kelas I Tangerang Beni Hidayat mengatakan, Indra harus kembali menjalani sisa masa hukumannya selama tiga tahun dua bulan 14 hari.

“Yang bersangkutan kami tempatkan pada sel isolasi khusus block maximum security,” ujar Beni, Sabtu (10/10/2026).

“Berdasarkan perhitungan sisa pidana yang harus dilaksanakan

yaitu 3 tahun 2 bulan 14 hari,” sambungnya.

Sebelumnya, Indra mendapat pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Namun, status tersebut kemudian dicabut sehingga dia harus kembali menjalani hukuman di Lapas Kelas I Tangerang.

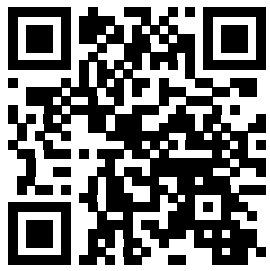
Pencabutan itu menyusul dugaan Indra menempati sebuah kontainer dengan interior menyerupai rumah tinggal di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Keberadaan fasilitas mewah di dalam lapas tersebut sebelumnya menjadi sorotan Ombudsman

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Link Video Viral Poltekkes Bandung 13 Menit Bikin Heboh, Sosok Perempuan Berseragam Putih Dicari Netizen

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.50 WIB



BANDA ACEH – Link video viral Poltekkes Bandung berdurasi 13 menit bikin heboh. Sosok perempuan berseragam putih jadi sorotan, kampus tegas membantah isu tersebut.

Link video viral Poltekkes Bandung berdurasi 13 menit menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan mengenakan pakaian putih dengan atribut bertuliskan KEMENKES itu memancing rasa penasaran warganet.

Namun, di tengah ramainya pembahasan, pihak kampus memberikan klarifikasi dan membantah bahwa sosok dalam video merupakan mahasiswi mereka.

Perbincangan ini bermula ketika sebuah rekaman dewasa beredar di internet dan dikaitkan dengan institusi pendidikan kesehatan di Bandung.

Video tersebut dilaporkan sempat diunggah pada Minggu, 4 Oktober 2026, di sebuah situs dewasa.

Kemunculan atribut pada pakaian perempuan dalam rekaman kemudian memunculkan dugaan yang menghubungkannya

dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung.

Seiring meluasnya kabar tersebut, pencarian mengenai video viral Poltekkes Bandung ikut menjadi perhatian.

Sejumlah warganet mempertanyakan identitas perempuan dalam rekaman serta kebenaran kabar yang mengaitkannya dengan lingkungan kampus.

Meski begitu, informasi yang ramai dibicarakan di internet belum tentu sesuai dengan fakta.

Pihak kampus pun mengambil langkah untuk meluruskan kabar tersebut agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang merugikan pihak tertentu.

Melalui akun Instagram resmi @polkesbandung, Poltekkes Kemenkes Bandung menyampaikan klarifikasi terkait video yang beredar.

Institusi tersebut menegaskan bahwa individu dalam rekaman bukan mahasiswi mereka berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi internal

Salah satu hal yang menjadi perhatian kampus adalah atribut pakaian yang terlihat dalam video.

Menurut penjelasan resmi tersebut, desain seragam, bentuk dan posisi logo, serta identitas visual lainnya tidak sesuai dengan atribut resmi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung.

Keterangan ini sekaligus meluruskan dugaan yang berkembang di media sosial.

Artinya, keberadaan tulisan atau atribut yang menyerupai identitas sebuah institusi tidak bisa dijadikan bukti bahwa orang yang mengenakannya merupakan bagian dari

Pihak kampus juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Penyebaran kabar tanpa dasar yang jelas berpotensi memunculkan kesalahpahaman dan merugikan nama baik institusi maupun individu.

Kementerian Kesehatan turut menanggapi isu yang menyeret nama Poltekkes Bandung.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Poltekkes Kemenkes Bandung.

Dari hasil pengamatan yang disampaikan Kemenkes, bordir tulisan Poltekkes pada bagian dada pakaian dalam video bukan identitas Poltekkes Kemenkes Bandung.

Pihak kampus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap daftar mahasiswa dan pegawai.

Berdasarkan keterangan Aji, tidak ditemukan mahasiswi yang memiliki kemiripan dengan perempuan dalam rekaman tersebut.

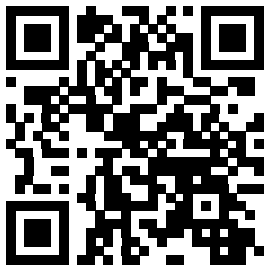
Klarifikasi dari kedua pihak ini menjadi informasi penting di tengah derasnya kabar yang beredar.

Masyarakat diharapkan mengutamakan keterangan resmi daripada mengikuti spekulasi yang belum memiliki dasar kuat.

Tingginya rasa penasaran terhadap video viral berdurasi 13 menit perlu diimbangi dengan sikap bijak saat menggunakan internet.

Memburu tautan, mengunduh, atau membagikan ulang rekaman intim justru dapat memperluas penyebaran konten yang berpotensi melanggar privasi seseorang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

ANEKA BERITA

3 BERITA

OPINI

Selembar Ijazah dan Roh Pendidikan yang Hilang

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.31 WIB



Oleh:Yudhi Hertanto

SERU! Kita tidak sedang berbi-cara mengenai ijazah sebagai syarat pencalonan jabatan publik, melainkan tentang esensi lembar pengukuhan akademik tersebut di tengah gempuran kecerdasan buatan. Era modern menghadirkan solusi instan melalui teknologi, yang kemudian mengambil alih berbagai bidang pekerjaan.

Sementara itu, kita masih terje-bak pada perdebatan usang, ten-tang makna penting selembaar ijazah atau kompetensi nyata? Iro-nisnya, kebijakan makro sering kali masih memperlakukan insti-tusi pendidikan, layaknya mesin pencetak sertifikat.

Publik hafal dengan kelakar sinis, gonta-ganti kurikulum. Bahkan pasca-kemerdekaan, telah belasan kali terjadi perombakan kurikulum. Sayangnya, perubahan bertubi-tubi tersebut masih bersi-fat kosmetik, elitis, dan sarat muatan politis, alih-alih menyen-tuh akar filosofis kelemahan pen-didikan di ruang kelas (Alhamud-din, 2014).

Untuk memahami kekacauan struktural itu, perlu menengok kembali ke akar peradaban. Jauh sebelum era kolonial, terdapat ekosistem pendidikan organik dan membumi melalui padepokan dan pondok pesantren. Di institusi tra-disional tersebut, pendidikan tidak berformat transaksional untuk sekadar mendapatkan selembaar kertas tanda lulus.

Proses belajar di masa lalu, menyatu erat dengan ekologi alam dan masyarakat, berpusat pada pembentukan karakter moral, etika, kesalehan sosial, dan kemandirian hidup (Dhofier, 2011). Kemudian mengalami perubahan drastis, seiring hege-moni kolonialisme. Melalui kebi-jakan Politik Etis, didirikan seko-lah formal. Dengan niat pragmatis diskriminatif, mencetak pegawai rendah -klerk biaya murah, patuh pada birokrasi kulit putih (Collins et al., 2021).

Di titik historis inilah, cikal bakal fetisisme ijazah bermula. Masyarakat mulai didoktrin bahwa institusi pendidikan sekolah, men-

jadi alat pendongkrak status sosial untuk menjadi amtenar--pegawai pemerintah yang bergaji tetap.

Merespons proses dehumanisasi tersebut, Ki Hajar Dewantara melawan dengan mendirikan Tamansiswa pada 1922. Melalui Sistem Among dan semboyan Tut Wuri Handayani, secara radikal ditegaskan bahwa esensi pendidi-kan adalah untuk memerdekakan jiwa dan raga manusia, bukan sekedar mencetak sekumpulan biro-krasi.

Pada waktu yang hampir bersa-maan, John Dewey (1899), juga mengkritik konsep sekolah yang diisolasi layaknya menara gading. Bagi Dewey, pendidikan bukanlah persiapan untuk masa depan, melainkan bagi kehidupan itu sen-diri, sebuah proses empiris lear-ning by doing yang berbaur dengan masyarakat.

Lantas, dengan landasan filoso-fis pembebasan Dewantara dan progresifitas Dewey, mengapa gagasan luhur tersebut gagal mem-bumi di sistem persekolahan saat ini?

Konklusinya terlihat pada kajian Randall Collins (1979), mengenai Credential Society -masyarakat pemuja ijazah. Menurut Collins, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan dikooptasi menjadi sarana stratifikasi kelas. Sehingga, ijazah atau gelar akademik beru-bah fungsinya menjadi semacam mata uang sosial, sebagai akses menuju pekerjaan yang prestisius.

Konsekuensinya menjadi fatal: institusi pendidikan terdegradasi menjadi pabrik pencetak diploma belaka. Stempel kelulusan dan nilai IPK tinggi dipuja, tanpa mempertanyakan apakah terdapat struktur penalaran mendalam dan kritis dalam empati sosial.

Kini, di era disrupsi, tat kala mesin dan algoritma dapat mela-kukan pekerjaan klerikal jauh lebih cepat serta akurat daripada otak manusia, obsesi buta pada kredensial formal menjadi sangat berbahaya dan tak relevan. Perlu segera dilakukan pembenahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

LINGKUNGAN

Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Panama, Tsunami Ancam Sejumlah Negara

Oleh Redaksi · 10 Okt, 08.37 WIB



BANDA ACEH – Gempa dahsyat bermagnitudo 7,6 mengguncang wilayah dekat pesisir selatan Panama, Jumat (9/10/2026) pagi waktu setempat atau Sabtu (10/10/2026) dini hari WIB. Gun-gungan terasa kuat hingga mem-buat gedung-gedung di ibu kota Panama City bergetar dan warga berhamburan mengevakuasi diri.

Melansir Reuters, Sistem Peri-ngatan Tsunami Amerika Serikat memperingatkan potensi gelom-bang tsunami berbahaya di sejum-lah wilayah pesisir dalam tiga jam setelah gempa. Wilayah yang ber-potensi terdampak mencakup Panama, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Peru, Nikaragua, Guate-

mala, El Salvador, dan Meksiko. Sistem tersebut juga menyatakan ancaman tsunami hingga Hawaii.

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mencatat gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Magni-tudo gempa awalnya diperkirakan mencapai 8,0, tetapi kemudian direvisi menjadi 7,6.

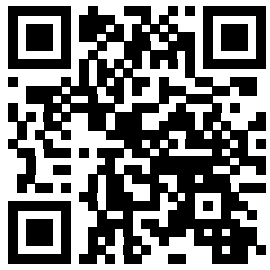
Pusat gempa berada sekitar 10 km barat daya Pitaloza Arriba, sebuah komunitas terpencil di dekat ujung selatan Panama.

Rekaman televisi lokal memper-lihatkan warga panik meninggal-kan bangunan dan berkumpul di jalanan setelah gempa menggun-cang wilayah tersebut

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

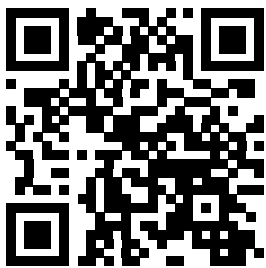
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



IN-DEPTH

Ijazah yang Tak Pernah Ada: Putusan MK yang Mengakui Fakta dan Menolak Konsekuensinya

Oleh Redaksi · 10 Okt, 07.00 WIB



Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/AI for HAI.

ELASA malam, enam Oktober dua ribu dua puluh enam. Pukul dua puluh WIB, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengetuk palu. Putusan perkara nomor nol satu PHPU PRES dua puluh empat dua puluh enam dibacakan: permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak dapat diterima.

Tapi di balik penolakan itu, ada temuan yang lebih keras dari yang diminta para pemohon. Hakim Arsul Sani menyatakan, setelah mempelajari semua bukti dan fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai Pasal seratus enam puluh sembilan huruf r dan Pasal dua

ratus dua puluh tujuh huruf l UU Pemilu.

Yang ada, hanya certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades dari UTS Insearch di Sydney. Menurut MK, itu bukan bukti kelulusan — itu bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Surat Keterangan Penyetaraan nomor sembilan satu empat sembilan tahun dua ribu sembilan belas, yang jadi dasar pendaftaran Gibran ke KPU, ternyata menyatakan pengetahuan setara SMK peminatan akuntansi dan keuangan. Bukan tamat SMA.

Reuters melaporkan dengan judul "Indonesia's Constitutional Court dismisses challenge to vice president over education credentials" — dokumen tidak lengkap, tapi tidak mendiskualifikasi. ABC Australia lebih tajam: "Court dismisses challenge against Indonesia's vice-president but impeachment remains possible." Bloomberg menulis Gibran tetap di kantor, meski hakim meragu-

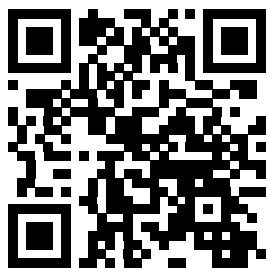
kan apakah dia memenuhi syarat mencalonkan diri. Channel News Asia menyebut dokumennya "incomplete" dan menyerahkan penilaian kelayakan ke lembaga lain. The Straits Times menulis MK "appeared to agree" bahwa kertas-kertas Gibran tidak membuktikan diploma setara SMA.

Kenapa tetap tidak didiskualifikasi? Dua alasan. Pertama, pemohon bukan pasangan calon, jadi tidak punya kedudukan hukum. Hakim Liliek P. Adi menyebut, "Oleh karena itu, para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo." Kedua, status Gibran sebagai calon sudah berakhir sejak dilantik pada dua puluh Oktober dua ribu dua puluh empat. Hakim Adies Kadir menyebut MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran, dan menyerahkan urusan ini ke lembaga lain yang berwenang sesuai UUD empat puluh lima.

Lembaga itu, secara konstitusional, adalah DPR. Pasal tujuh A dan tujuh B membuka jalan pemberhentian jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat — lewat usul DPR ke MK, lalu keputusan MPR. Syaratnya berat: dua pertiga anggota DPR yang hadir, disetujui dua pertiga dari yang hadir. Tapi jalur itu ada, dan ABC sudah menyebutnya.

Di Istana, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto meminta publik tidak menafsirkan mentah-mentah. "Bukan tidak ada, belum diketemukan," katanya. Jokowi menghormati putusan MK, sambil menjelaskan perbedaan sistem pendidikan tiap negara. Gibran menjawab singkat: kalau tidak lulus SMA, dia tidak mungkin bisa kuliah — dia menyelesaikan sarjannya di Singapura.

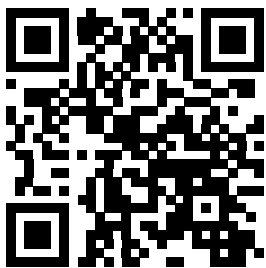
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia